

**EFISIENSI ANGGARAN BELANJA PERJALANAN  
DINAS PADA MASA PANDEMI *COVID-19* DI  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA  
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**Cantika Diva R  
NIM. 07011381722136**

**Konsentrasi Keuangan Negara Dan Fiskal**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOVEMBER 2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**EFISIENSI ANGGARAN BELANJA PERJALANAN DINAS PADA  
MASA PANDEMI *COVID-19* DI SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA  
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**SKRIPSI**

Oleh:  
**CANTIKA DIVA RAMADINA**  
07011381722136


Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, November 2021

Pembimbing I  
Dr. Lili Erina, M.Si  
NIP. 196612301992032001



---

Pembimbing II  
Drs. Mardianto, M.Si  
NIP. 196211251989121001



---

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

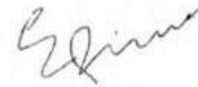
**EFISIENSI ANGGARAN PERJALANAN DINAS PADA MASA  
PANDEMI COVID-19 DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**SKRIPSI**

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada tanggal 13 Januari 2022  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

**TIM PENGUJI SKRIPSI**

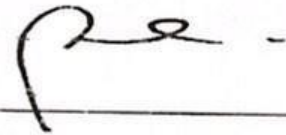
**Dr. Lili Erina, M.Si**  
Ketua



**Drs. Mardianto, M.Si**  
Anggota



**Junaidi, S.IP., M.Si**  
Anggota



**Dwi Mirani, S.IP., M.Si**  
Anggota



**Palembang, Januari 2022  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Alfitri, M.Si**  
NIP. 496601221990031004

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.  
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”  
(Q.S. Al Insyirah 5-6)**

**Atas Ridha Allah SWT, Skripsi**

**Ini Saya Persembahkan**

**Kepada:**

**1. Kedua Orang Tua Saya dan**

**Kedua Adik Kesayangan**

**2. Seluruh Dosen dan Pegawai**

**FISIP UNSRI**

**3. Rekan Seperjuangan Ilmu**

**Administrasi Publik Angkatan**

**2017**

**4. Almamater Kebanggaan**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efisien anggaran belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada masa pandemi *Covid-19* tahun anggaran 2020 dilihat dari empat komponen biaya perjalanan dinas yaitu uang harian, uang transportasi, uang penginapan, dan uang representasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kenaikan jumlah penggunaan anggaran perjalanan dinas dalam daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada masa pandemi *Covid-19* disaat adanya efisiensi penggunaan anggaran. Analisis efisiensi menggunakan rasio efisiensi menurut Mahmudi yaitu perbandingan antara realisasi anggaran perjalanan dinas dan anggaran belanja perjalanan dinas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan belum sepenuhnya melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. Adapun efisiensi dilihat dari komponen biaya perjalanan dinas dalam daerah pada komponen biaya uang harian dan uang penginapan kurang efisien, sedangkan komponen biaya perjalanan dinas luar daerah pada komponen biaya uang transportasi dan uang penginapan kurang efisien tetapi untuk komponen biaya perjalanan dinas yang lain dapat dikatakan cukup efisien. Adapun saran dalam penelitian ini adalah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan harus menentukan skala prioritas dan meminimalisir penggunaan anggaran disaat pandemi *Covid-19* agar tepat guna dan sasaran tanpa harus ada perintah dari pusat.

**Kata Kunci:** Efisiensi, Anggaran, Perjalanan, Dinas, Komponen, Biaya, *Covid-19*, DPRD

Pembimbing I



**Dr. Lili Erina, M.Si**  
NIP. 196612301992032001

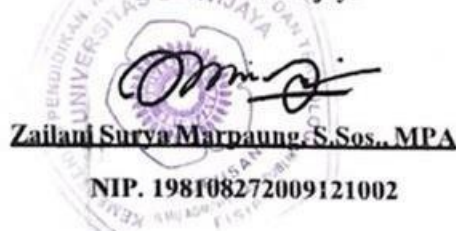
Pembimbing II



**Drs. Mardianto, M.Si**  
NIP.196211251989121001

Palembang, Januari 2022

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya**



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**  
NIP. 198108272009121002

## ABSTRACT

*This study aims to find out how efficient the budget for official travel expenses within the region and outside the region at the DPRD Secretariat of South Sumatra Province during the Covid-19 pandemic in the 2020 fiscal year is seen from the four components of official travel costs, namely daily money, transportation money, lodging money, and representation money. This research was motivated by an increase in the amount of use of the regional official travel budget at the DPRD Secretariat of the South Sumatra Province during the Covid-19 pandemic when there was an efficient use of the budget. The efficiency analysis uses the efficiency ratio according to Mahmudi, namely the comparison between the realization of the official travel budget and the official travel budget. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques consist of interviews and documentation. The results of this study indicate that the Secretariat of the DPRD of South Sumatra Province has not fully implemented efficiency in the use of the official travel budget within the region and outside the region. The efficiency is seen from the components of the cost of official travel within the region in the component of daily fees and lodging fees which are less efficient, while the components of the cost of travel outside the region in the components of transportation costs and lodging fees are less efficient, but for other components of official travel costs, it can be said to be quite efficient.*

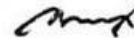
**Keywords:** *Efficiency, Budget, Travel, Service, Component, Cost, Covid-19, DPRD*

Advisor I



**Dr. Lili Erina, M.Si**  
NIP. 196612301992032001


Advisor II



**Drs. Mardianto, M.Si**  
NIP.196211251989121001

Palembang, January 2022

Chairman of The Department of Public Administration  
Faculty of Social and Political Sciences  
Sriwijaya University



**Zailani Surya Marpaing, S.Sos., MPA**

NIP. 198108272009121002

## SURAT KETERANGAN PENGECEKAN SIMILARITY

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Cantika Diva Ramadina  
Nim : 07011381722136  
Prodi : Administrasi Publik  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa benar hasil pengecekan similarity Skripsi/Tesis/Disertasi/Lap. Penelitian yang berjudul Efisiensi Anggaran Perjalanan Dinas Pada Masa Pandemi Covid-19 di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 adalah 16 %.

Dicek oleh operator \*: 1. Dosen Pembimbing  
② UPT Perpustakaan  
3. Operatur Fakultas.....

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat saya pertanggung jawabkan.

Palembang, 27 April 2022

Menyetujui

Dosen pembimbing,



Dr. Lili Erina, M.Si  
NIP. 196612301992032001



ng menyatakan,

Cantika Diva Ramadina  
07011381722136

\*Lingkari salah satu jawaban tempat anda melakukan pengecekan Similarity

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis mengucapkan kepada Allah, berkat rahmat dan karunia Nya penulis diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Derajat Sarjana Strata 1 Ilmu Administrasi Publik. Skripsi ini berjudul “Efisiensi Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Pada Masa Pandemi *Covid-19* Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020”.

Dalam menyelesaikan skripsi, penulis menyadari banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selamapenyusunan skripsi, kemudian kedua orang tua sebagai penyemangat terbaik yang tak pernah letih memberikan dukungan secara moril maupun material selama perkuliahan khususnya selama menyusun skripsi ini. Adapun penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. **Prof. Dr. KGS. M. Sobri, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. **Bapak Zailani Surya Marpaung S.Sos., MPA** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
4. **Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si** selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang membantu memperlancar proses akademik selama sembilan semester perkuliahan ini
5. **Ibu Dr. Lili Erina, M.Si** selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah memberikan waktu untuk membimbing serta memberikan saran dan masukan untuk membantu penyusunan skripsi ini
6. **Bapak Drs. Mardianto, M.Si** selaku Dosen Pembimbing II saya yang telah memberikan waktu untuk membimbing serta memberikan saran dan masukan untuk membantu penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberi ilmu pengetahuan dan para staf akademik yang telah membantu segala kepentingan perihal administrasi dan akademik selama masa pendidikan.
8. **Bapak Aprizal, S.Ag, SE, M.Si** selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan
9. **Bapak Apran S.H** selaku Kasubbag Pembendaharaan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan
10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis sudah berusaha maksimal dalam penyusunan skripsi ini. Apabila masih ada kekeliruan dalam penulisannya, penulis menerima kritik yang membangun. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis mengucapkan terima kasih.

Palembang, Agustus 2021

Cantika Diva



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....</b>	<b>II</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>III</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>IV</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>V</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>VII</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>IX</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>X</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>2</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Landasan Teori.....	12
1. Keuangan Negara .....	12
2. Efisiensi .....	13
3. Anggaran Sektor Publik .....	16
4. Perjalanan Dinas .....	20
B. Teori Yang Digunakan .....	22
C. Penelitian Terdahulu .....	23
D. Kerangka Pemikiran.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Definisi Konsep .....	27
C. Fokus Penelitian .....	28
D. Sumber Data.....	29
E. Informan Penelitian .....	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	31
H. Teknik Keabsahan Data .....	32
I. Sistematika Penulisan .....	33
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian.....	35
1. Sejarah Singkat Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan .....	35
2. Visi dan Misi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.....	37
3. Pembagian Tugas di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan .....	39
B. Analisis Efisiensi Anggaran Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.....	42
1. Analisis Efisiensi Anggaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah .....	42
2. Analisis Efisiensi Anggaran Perjalanan Dinas Luar Daerah.....	52
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
1. Saran Teoritis .....	64
2. Saran Praktis.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Anggaran Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 .....	7
2. Anggaran Perjalanan Dinas Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 Di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 .....	8
3. Kriteria Tingkat Efisiensi.....	16
4. Kriteria Tingkat Efisiensi.....	23
5. Penelitian Terdahulu .....	23
6. Fokus Penelitian.....	29
7. Rencana Kerja Pada Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Di DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 .....	44
8. Realisasi Rencana Kerja Pada Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Di DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020.....	45
9. Rencana Alokasi Peserta Perjalanan Dinas Dalam Daerah Di DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.....	46
10. Realisasi Rencana Alokasi Peserta Perjalanan Dinas Dalam Daerah Di DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.....	47
11. Komponen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 .....	48
12. Rasio Efisiensi Komponen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020.....	51
13. Rencana Kerja Pada Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Di DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 .....	53
14. Realisasi Rencana Kerja Pada Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Di DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 .....	54
15. Rencana Alokasi Peserta Perjalanan Dinas Luar Daerah Di DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.....	56
16. Realisasi Rencana Alokasi Peserta Perjalanan Dinas Luar Daerah Di DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.....	57
17. Komponen Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020.....	58
18. Rasio Efisiensi Komponen Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 .....	61
19. Matriks Hasil Penelitian.....	62

## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

1. Kerangka Pemikiran ..... 24
2. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan ..... 41

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat Balasan Izin Penelitian Dari Instansi
4. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 1
5. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 2
6. Lembar Tanda Tangan Revisi Proposal oleh Dosen Penguji 1
7. Lembar Tanda Tangan Revisi Proposal oleh Dosen Penguji 2
8. Lembar Tanda Tangan Revisi Proposal oleh Dosen Pembimbing 2
9. Matriks Pedoman Wawancara
10. Dokumentasi Penelitian

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu pendek (periode) tertentu yang akan datang (Munandar, 2010:1). Anggaran dapat juga dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial (Nordriawan dkk, 2012:18). Berdasarkan pendapat dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu rencana tertulis mengenai kegiatan sebuah organisasi yang dicapai dalam periode waktu tertentu yang berisi tentang penerimaan dan pengeluaran anggaran yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Penyelenggaraan pemerintah daerah selalu berhubungan dengan adanya penggunaan dan pemanfaatan anggaran serta pendapatan daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja daerah diklasifikasikan dalam dua jenis yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari; belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Di dalam belanja pegawai terdapat belanja perjalanan dinas.

Belanja perjalanan dinas adalah berbagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka perjalanan dinas sehubungan dengan tugas dan fungsi dalam sebuah instansi yang

dilakukan dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam wilayah Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, karena perpindahan tersebut memerlukan biaya-biaya maka kepada pegawai diberikan fasilitas perjalanan dinas. Komponen biaya perjalanan dinas tersebut terdiri dari; uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan, uang representasi, sewa kendaraan dalam kota, dan/atau biaya menjemput/mengantar jenazah. Peraturan pelaksanaan perjalanan dinas yaitu PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang menegaskan bahwa pelaksanaan perjalanan dinas harus memperhatikan empat prinsip yaitu selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja K/L, efisiensi penggunaan belanja negara dan akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas serta pembebanan biaya perjalanan dinas. Berdasarkan keempat prinsip perjalanan dinas, prinsip efisiensi harus diterapkan saat perjalanan dinas agar pengeluaran belanja perjalanan dinas tepat guna dalam pelaksanaannya.

Gerakan efisiensi merupakan salah satu program unggulan dari inisiatif strategis penguatan budaya Kementerian Keuangan sesuai dengan Instruksi Menteri Keuangan Nomor IMK-346/IMK.01/2017. Efisiensi merupakan wujud implementasi nilai-nilai dalam bentuk perubahan pola pikir dan perilaku melalui efisiensi pelaksanaan tugas dan efisiensi anggaran birokrasi. Efisiensi ialah suatu kesadaran bersama, bahwa penghematan belanja publik dapat dilakukan mulai dari diri sendiri untuk mengajak di lingkungan organisasi agar terus menghadirkan sikap yang baik dalam membelanjakan anggaran tersebut. Efisiensi dapat diartikan tidak adanya pemborosan melainkan penghematan. Hal ini dikarenakan anggaran harus tepat sasaran dan berdaya guna tinggi. Adapun menurut Mahmudi (2019:164)

, untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan rasio efisiensi belanja yang membandingkan realisasi belanja dan anggaran belanja. Adanya penghematan yang dilakukan melalui hal-hal kecil dapat

memberi dampak besar bagi penghematan anggaran itu sendiri, misalnya anggaran dapat diprioritaskan untuk kepentingan yang sangat mendesak dan tidak terduga.

Tahun 2020 pandemi *Covid-19* yang menghantam global berdampak signifikan di Indonesia. Penyebaran *Covid-19* di Indonesia dimulai sejak tanggal 02 Maret 2020 dan terus mengalami peningkatan setiap harinya. Jumlah orang meninggal akibat *Covid-19* di Indonesia juga sudah mencapai lebih dari 21 ribu orang. Angka ini diperparah dengan *positivity rate* Indonesia yang sempat tembus rekor 27,6 persen atau lima kali lipat standar WHO yang hanya lima persen. *Positivity rate* adalah persentase orang yang memiliki hasil tes positif *Covid-19* dibandingkan jumlah orang yang di tes (Liputan6.com, 2020). Adapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), PSBB Transisi, Adaptasi Kebiasaan Baru, Isolasi Mikro Kecil, PSBM (Pembatasan Sosial Berskala Mikro), *Work From Home*, dan *Physical Distancing* guna untuk menekan penyebaran virus Corona ini. Kebijakan ini secara tidak langsung memberikan dampak kerugian material yang semakin besar dikarenakan terhentinya interaksi kegiatan sosial sebagian besar industri dan perkantoran yang dilarang beroperasi untuk kurun waktu yang relatif lama, sehingga berakibat langsung pada aspek ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Perekonomian masyarakat yang melemah baik di bidang pemerintahan maupun swasta terlihat jelas. Indonesia memasuki masa resesi ekonomi pada kuartal ketiga tahun 2020. Resesi yang terjadi tidak hanya berdampak pada sektor keuangan, tapi juga sektor riil, dunia usaha dan UMKM. Jadi, UMKM yang masih bisa bertahan, sekarang hampir 90 persen terdampak resesi dan pandemi (Liputan6.com, 2020). Dengan adanya kelumpuhan di setiap aspek ini, mengharuskan pemerintah untuk menggeserkan alokasi dana yang ada baik di pusat maupun di daerah.

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona*

*Virus Disease (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Ekonomi.* Sebagaimana dijelaskan dalam perpu ini, Presiden menyatakan bahwasanya peraturan ini akan memberikan fondasi bagi pemerintah, bagi otoritas perbankan, dan bagi otoritas keuangan untuk melakukan langkah- langkah dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan.

Sehubungan dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020, dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Presiden telah menginstruksikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan daerah untuk melakukan *refocusing* anggaran bagi dana kesehatan, bantuan sosial (bansos) dan mendukung dunia usaha khususnya UMKM. Presiden meminta kepada seluruh Kementrian/Lembaga untuk memangkas anggaran belanja yang tidak prioritas. Dalam hal ini pemerintah pun harus menentukan skala prioritas dengan mengalokasikan ulang anggaran sesuai tingkat urgensinya. Anggaran yang dapat direalokasi adalah anggaran sosialisasi seperti perjalanan dinas dan pertemuan yang tidak perlu guna mencegah menyebarnya virus *Covid-19*, yang mana intensitas kontak fisik harus dikurangi. Pandemi *Covid-19* telah memaksa masyarakat menjalani kehidupan yang lebih efektif dengan memanfaatkan *platform* digital sebagai sarana komunikasi. Pola ini mempengaruhi kegiatan seperti rapat, yang dilakukan oleh seluruh instansi. Dengan pemangkasan kegiatan perjalanan dinas, pemerintah memperoleh sumber-sumber inefisiensi untuk dialihkan ke kebutuhan lain yang sifatnya lebih mendesak.

Adanya pandemi *Covid-19* yang berpengaruh ke perekonomian masyarakat Sumatera Selatan mengakibatkan naiknya presentase angka kemiskinan hingga



persen. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur pendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sehingga untuk menjalankan fungsinya diperlukan anggaran yang direncanakan setiap tahunnya. Pada hakekatnya anggaran yang digunakan oleh DPRD merupakan amanah dari rakyat yang bersumber dari APBD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam penggunaannya sebagai wakil rakyat di masa pandemi ini harus tepat guna dan tepat sasaran.

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan terdapat dua macam anggaran, yaitu anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional adalah anggaran yang dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan kegiatan pemerintah setiap tahunnya atau disebut juga dengan belanja rutin. Dengan demikian anggaran yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dari anggaran operasional yang dapat dikategorikan belanja rutin dalam program perjalanan dinas.

Jika dilihat dari target anggaran perjalanan dinas dan realisasi anggaran perjalanan dinas pada tahun 2019 dapat dilihat bahwa anggaran terserap dengan cukup baik. Berikut anggaran perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019:

**Tabel 1. Anggaran Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019**

No	Uraian	Anggaran Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	%
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	106.292.567.373,00	87.436.069.259,00	82,26%
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	159.963.719.247,00	150.100.630.674,00	93,83%
3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	3.193.250.000,00	2.130.340.531,00	66,71%
	<b>Jumlah</b>	<b>269.449.536.620,00</b>	<b>239.667.040.464,00</b>	<b>88,95%</b>

*Sumber: Data dari Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan*

Berdasarkan tabel 1, pada tahun 2019 anggaran perjalanan dinas disediakan sebesar Rp. 269.449.536.620,00 dan terealisasi sebesar Rp. 239.667.040.464,00 dapat diketahui bahwa efisiensi penggunaan anggaran pada tahun 2019 sebesar 88,9 persen, dimana 88,9 persen tersebut dapat dikatakan cukup efisien. Namun, pada tahun 2020 terjadi pandemi *Covid-19* yang menyebabkan prioritas anggaran berubah dan efisiensi anggaran pun dilakukan. Berikut wawancara yang dilakukan bersama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan bapak Aprizal:

“Dikarenakan pandemi *Covid-19*, Gubernur Sumsel mengambil kebijakan untuk memotong anggaran khususnya anggaran perjalanan dinas untuk seluruh OPD di Provinsi Sumsel, jadi kita langsung melakukan pergeseran anggaran belanja perjalanan dinas sesuai dengan surat instruksi dari gubernur, yang mana anggaran yang terpotong ini langsung diberikan dan dikelola oleh BPKAD untuk dialokasikan ke dinas-dinas untuk percepatan penanganan *Covid-19*.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan melakukan perubahan anggaran perjalanan dinas. Berikut rincian Anggaran Belanja Langsung Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2020:

**Tabel 2 Anggaran Perjalanan Dinas Sebelum dan Sesudah Pandemi Di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020**

Uraian	Anggaran Sebelum Pandemi	Anggaran Setelah Pandemi	Realisasi Anggaran	Selisih Anggaran	Persentase (%)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.911.287.000	39.798.485.000	33.096.675.000	23.887.198.000	150,1%
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125.123.700.000	67.853.578.800	58.145.254.849	57.270.121.200	45,7%
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	6.880.000.000	0,00	0,00	-	100%
Jumlah	147.914.987.000	107.652.063.800	91.241.929.849	40.262.923.200	84,7%

*Sumber: Data dari Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan*

Pada bulan Januari tahun 2020, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan menerima anggaran perjalanan dinas sebesar Rp.147.914.987.000,00. Namun, pada pelaksanaannya di bulan Maret 2020 terhalang akibat pandemi *Covid-19* yang menyebabkan anggaran perjalanan dinas harus dipangkas untuk diprioritaskan ke penanganan *Covid-19*. Pada bulan Juni, menindaklanjuti surat instruksi dari Gubernur Sumatera Selatan yang meminta kepada seluruh OPD di lingkungan pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas sebesar 100 persen dan luar daerah 50 persen, anggaran perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan berubah menjadi Rp. 107.652.063.800,00 dan terjadi pemotongan

anggaran sebesar Rp. 40.262.923.200,00 atau sebesar 27,2 persen. Anggaran perjalanan dinas luar daerah yang semula sebesar Rp 125.123.700.000 menjadi Rp. 67.853.578.800 terjadi pemangkasan sebesar Rp. 58.145.254.849 atau sebesar 46,7 persen. Kemudian, anggaran perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp. 6.880.000.000 dipangkas habis menjadi Rp.00,0 atau sebesar 100 persen. Sedangkan, anggaran perjalanan dinas dalam daerah mengalami kenaikan yang semula sebesar Rp. 15.911.287.000 menjadi Rp. 39.798.485.000 atau sebesar 150,1 persen.

Anggaran perjalanan dinas dalam daerah yang mengalami kenaikan sangat bertolak belakang dengan Instruksi Presiden dalam melakukan efisiensi anggaran di tengah pandemi *Covid-19*. Berikut wawancara yang dilakukan bersama Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan bapak Aprizal: “Pelaksanaan perjalanan dinas di masa pandemi *Covid-19* sempat dihentikan beberapa bulan dikarenakan ada surat edaran larangan berpergian, tetapi setelah itu dilakukan seperti biasa walaupun banyak yg menolak. Namun, memang berkurang intensitasnya untuk keluar provinsi, jadi banyak kunjungan kerja di dalam daerah.” (Hasil wawancara 4 Maret 2021)

Berdasarkan wawancara diatas dapat menunjukkan pemerintah melakukan larangan perjalanan dinas dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tanggal 09 April 2020 namun, setelah surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 yang mencabut larangan perjalanan dinas bagi aparatur sipil Negara diterbitkan kegiatan perjalanan dinas pun dilaksanakan kembali. Para ASN dan anggota DPRD yang menolak perjalanan dinas keluar provinsi dikarenakan mencegah kluster baru. Para ASN dan anggota DPRD merasa dampak positifnya tidak sebanding dengan resiko kesehatan berupa penularan *Covid-19*.

Efisiensi merupakan suatu kesadaran bersama, bahwa penghematan belanja publik dapat dilakukan mulai dari diri sendiri untuk mengajak di lingkungan organisasi agar terus menghadirkan sikap yang baik dalam membelanjakan anggaran tersebut. Namun, pada kenyataannya terdapat kenaikan anggaran perjalanan dinas dalam daerah sebesar 150,1 persen disaat adanya pemangkasan anggaran perjalanan dinas luar daerah sebesar 45,7 persen dan luar negeri sebesar 100 persen. Meskipun pada prinsipnya perjalanan dinas tetap dilakukan dengan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran yang dapat dilihat dari komponen biaya perjalanan dinas yang terdiri atas; uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan, dan uang representasi.

Adanya suatu penelitian sangat diperlukan untuk mendapatkan data dan informasi yang mendalam dan mendekati kenyataan tentang kesenjangan yang ada pada efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan memperhatikan penggunaan anggaran yang dapat dilihat dari komponen biaya perjalanan dinas yang terdiri atas; uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan, dan uang representasi. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan judul “Efisiensi Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Pada Masa Pandemi *Covid-19* Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu Apakah Penggunaan Komponen Biaya Perjalanan Dinas Sudah Efisien Selama Masa Pandemi *Covid-19* Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi penggunaan komponen biaya perjalanan dinas pada anggaran belanja perjalanan dinas selama masa pandemi *Covid-19* di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian yang dapat dilakukan adalah :

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara, khususnya konsentrasi Keuangan Negara dan Fiskal. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari penelitian yang dilakukan dengan menerapkan teori yang diperoleh selama perkuliahan dalam membahas tentang efisiensi penggunaan anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan, dan tambahan referensi untuk kemajuan dan perkembangan pada pihak Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai bahan kajian yang bermanfaat untuk para pembaca yang berminat dan tertarik untuk mengkaji permasalahan mengenai anggaran belanja dalam instansi pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Salemba.
- Catriana, Elsa. 2020. *COVID-19 Perlambat Pertumbuhan Ekonomi Global*.  
<https://money.kompas.com/read/2020/03/01/074000226/ekonom--covid-19-perlambat-pertumbuhan-ekonomi-global>. Diakses pada 28 Desember 2020.
- Huberman, Michael. 2014. *Qualitative Data Analysis*. USA: SAGE Publications.
- Humas. 2020. *Lima Poin Kebijakan Pemerintah Berlandaskan Perpu Nomor 1 Tahun 2020*. Diakses pada 26 Desember 2020. setkab.go.id.
- Ihsanudin. 2020. *Kebijakan Jokowi Di Tengah Pandemi Covid-19*.  
<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/26/07412441/9-kebijakan-ekonomi-jokowi-di-tengah-pandemi-covid-19-penanggulangan-cicilan?page=all>. Diakses pada 1 Februari 2020
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Muhyidin. (2020). *Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. The Indonesian Journal of Development Planning, 4(2), 240-252.
- Noerdiawan, D. & Iswahyudi, S.P. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba.
- Noerdiawan, D. & Hertianti, A. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba.
- Paat, H.P., Nangoi, G.B., & Pusung, R.J. (2019). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon*. Jurnal EMBA, 7(3), 2979-2988.
- Pangkey, I. & Pinatik, S. (2015). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA, 3(4), 33-43.
- Perpu No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID 19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- Putra, F. A. & Dhiniharitsa, N. (2020). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja*. Jurnal Akuntansi Indonesia, 9(1), 1-10.
- Rampengan, M., Nangoi, G., & Manossoh, H. (2016). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Bappeda Kota Manado*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(03), 616-623.
- Situmorang, Anggun. 2020. *Dikritik DPR, Sri Mulyani Janji Bakal Perketat Perjalanan Dinas Dan Belanja Honoror*. Diakses Pada 28 Desember 2020. <https://m.merdeka.com/uang/dikritik-dpr-sri-mulyani-janji-bakal-perketat-perj-alanan-dinas-dan-belanja-honoror.html>.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko. 2016. *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: BPFE
- Syahida, M. P., Sjamsudin, S. & Pratiwi, R. N. *Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan DPRD dalam Perspektif Kepemerintahan yang Baik*. Jurnal Administrasi Publik, 1(4), 101-109.
- Toegarisman, Adi. 2016. *Pemberantasan Korupsi Dalam Paradigma Efisiensi*. Jakarta: Kompas Media.
- Wicaksono, Windi. 2020. *Periode Sulit 2020, Hantaman Pandemi Covid-19 hingga Resesi Ekonomi*. Diakses Pada 25 Februari 2021. <https://www.liputan6.com/news/read/4446142/special-content-periode-sulit-2020-hantaman-pandemi-covid-19-hingga-resesi-ekonomi>.
2020. *Implementasi Kebijakan Keuangan Pemerintah Di Pemerintah Pusat Dan Daerah Akibat Pandemi Covid-19*. <https://feb.unpad.ac.id/implementasi-kebijakan-keuangan-di-pemerintah-pusat-dan-daerah-akibat-pandemi-covid-19/>. Diakses Pada 26 Desember 2020